

PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN PERANCIS-INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN JOKOWI DAN EMMANUEL MACRON

Adinda Mustika Nazara¹,
Aulia Srifauzi²,

Universitas Potensi Utama, Medan
Email: aagunawan02@gmail.com1, aulia.srifauzi@potensi-utama.ac.id2

ABSTRAK

Setiap negara dalam mengatur jalannya roda pemerintahannya menggunakan sistem pemerintahan yang berbeda-beda, negara dan sistem pemerintahan adalah suatu kesatuan dimana lembaga-lembaga negara bekerja dan berhubungan satu sama lain, dimana setiap lembaga negara harus menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin agar tujuan dari suatu negara tersebut berhasil menyelenggarakan serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Begitupun dengan negara Indonesia dan Prancis dengan pimpinan negaranya masing-masing. Sistem pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh presiden Joko Widodo ini dapat dilihat dari model pemerintahan yang ingin dilakukan oleh Presiden Joko Widodo mirip dengan gaya pemerintahan masa Soekarno dimana keinginan besar Soekarno adalah menginginkan Indonesia menjadi macan asia menjadi Negara besar yang ditakuti oleh Negara-negara lain di dunia. Kedekatan kepada rakyat dengan turun langsung ke masyarakat di daerah-daerah untuk melihat secara langsung keadaan rakyat dan melihat secara langsung hasil kerja dari para menterinya. Sedangkan sistem pemerintahan Perancis yang dipimpin oleh Emmanuel Carnos memiliki gaya kepemimpinan lebih dekat pada meminjam konsep gaya kepemimpinan milik Jerrold Post, Hermann dan Hudson sebagai konsilitatoris.

Kata Kunci : Sistem Pemerintahan, Konsilitatoris, Macan Asia

ABSTRACT

Each country in regulating the course of its government uses a different system of government, the state and the system of government are a unit where state institutions work and relate to each other, where each state institution must carry out its duties as well as possible so that the goals of a country are managed to organize and realize the welfare of society and the interests of the state. Likewise with the countries of Indonesia and France with their respective heads of state. The Indonesian government system led by President Jokowi can be seen from the government model that President Joko Widodo wants to carry out, similar to the style of government during Soekarno's time where Soekarno's great desire was to want Indonesia to become an Asian tiger to become a big country that is feared by other countries in the world. Proximity to the people by going directly to the people in the regions to see firsthand the condition of the people and see firsthand the work of the ministers. Meanwhile, the French government system led by Emmanuel Carnos has a leadership style that is closer to borrowing the leadership style concept of Jerrold Post, Hermann and Hudson as conciliators.

.Keywords: Government System, Conciliator, Asian Tiger.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, Negara dalam menjalankan tatanan pemerintahannya membutuhkan adanya sistem pemerintahan

guna memperlancar berjalannya roda pemerintahan didalamnya. Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari fungsi legislatif,

eksekutif dan yudikatif yang saling berkaitan dalam bekerja dan saling mempengaruhi satu sama lain. Menurut Jimly Asshidiqie sistem pemerintahan diartikan sebagai sistem hubungan antar lembaga negara. Penyelenggaraan pemerintahan, sistem pemerintahan menjadi salah satu faktor penentu keberlangsungan kehidupan bernegara, sistem pemerintahan pada suatu negara akan berjalan efektif apabila sistem yang dipilih dan digunakan sesuai dengan karakter dan kondisi sosial dan politik negara. Namun apabila sistem pemerintahan yang digunakan tidak sesuai maka bisa dipastikan akan timbul kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia pada awal kemerdekaan menganut sistem pemerintahan presidensial, namun seiring perkembangannya tidak konsisten dalam menerapkan sistem pemerintahan presidensial, namun pada akhir tahun 1945 sistem pemerintahannya bergeser pada sistem pemerintahan parlementer terlebih dengan diterapkannya konstitusi RIS dan UUDS, setelah munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mulailah kembali sistem pemerintahan Indonesia kembali pada sistem pemerintahan presidensial. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkaitan dengan sistem pemerintahan terjadi pada saat perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pasal-pasal yang mengatur tentang presiden dan wakil presiden banyak sekali mengalami perubahan, demikian juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis

Permusyawaratan Rakyat. Perubahan tersebut berpengaruh terhadap hubungan antara Presiden dan lembaga Legislatif, terutama hubungan Presiden dengan DPR dan MPR. Fraksi-fraksi di MPR periode 1999-2004 pada saat amandemen UUD NRI 1945 telah melakukan kesepakatan untuk mempertahankan pembukaan UUD NRI 1945, mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertahankan bentuk pemerintahan sistem presidensial, mempertahankan memasukan norma-norma kenegaraan yang terdapat dalam penjelasan UUD NRI 1945 dalam pasal-pasal UUD 1945, mempertahankan menggunakan pendekatan amandemen dalam amandemen UUD NRI 1945.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam menjalankan roda pemerintahannya Prancis salah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan campuran antara presidensial dan parlementer atau sistem semi presidensial. Perancis dalam menjalankan tatanan pemerintahannya dipimpin oleh Presiden yang bertindak sebagai Kepala Negara dan dibantu Perdana Menteri, lembaga eksekutif di Perancis memiliki dua pemimpin dimana kekuasaan Kepala Negara dijalankan oleh Presiden Republik yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan selama 5 tahun dan pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Sistem ketatanegaraan di Perancis terkait lembaga perwakilan menggunakan sistem bikameral atau sistem dua kamar, parlemen Perancis meliputi dua buah badan

yaitu Assemblée Nationale dan Senat. Assemblée Nationale terdiri dari beberapa anggota yang berjumlah 490 orang "Deputés" yang masing-masing dipilih untuk masa jabatan lima tahun dengan pemilihan secara langsung serta mewakili keseluruhan rakyat pada umumnya dianggap lebih peka terhadap opini masyarakat, dan satuan-satuan wilayah pada umumnya tersusun dari tokoh-tokoh dalam kehidupan berpolitik diwakili oleh lembaga senat.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional (national interest) adalah konsep yang paling populer dalam analisa

hubungan internasional, baik untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan, maupun menganjurkan perilaku internasional. Misalnya, Jepang memberi bantuan keuangan pada Indonesia karena kepentingan nasionalnya, yaitu menjamin kelancaran pasok atau supply bahan dasar bagi industrinya. Teori Kepentingan Nasional (National Interest), dalam teori ini menjelaskan bahwa untuk kelangsungan hidup suatu Negara maka negara harus memenuhi kebutuhan negaranya dengan kata lain yaitu mencapai kepentingan nasionalnya. Dengan tercapainya kepentingan nasional maka negara akan berjalan dengan stabil, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun pertahanan keamanan dengan kata lain jika kepentingan nasional terpenuhi maka negara akan tetap survive. Kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar dan

faktor paling menentukan yang memadu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri.

Dalam Teori Kepentingan Nasional (National Interest) Daniel S. Papp yang mengatakan bahwa dalam kepentingan nasional terdapat beberapa aspek, seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas. Dalam hal ini, yang mana faktor ekonomi pada setiap kebijakan yang diambil oleh suatu Negara selalu berusaha untuk meningkatkan kanperekonomian Negara yang dinilai sebagai suatu kepentingan nasional. Suatu kepentingan nasional dalam aspek ekonomi diantaranya adalah untuk meningkatkan keseimbangan kerjasama perdagangan suatu Negara dalam memperkuat sektor industri, dan sebagainya.

Kepentingan Nasional (National Interest) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini yaitu keamanan (Security) dari kesejahteraan (Prosperity). Kepentingan nasional diidentikkan dengan dengan "tujuan nasional". Contohnya kepentingan pembangunan ekonomi, kepentingan pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau kepentingan mengundang investasi asing untuk mempercepat laju industrialisasi.

Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional (national interest) merupakan pilar utama bagi teorinya tentang politik luar negeri dan politik internasional yang realis.

Pendekatan morgenthau ini begitu terkenal sehingga telah menjadi suatu paradigma dominan dalam studi politik internasional sesudah Perang Dunia II.

Pemikiran Morgenthau didasarkan pada premis bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan-alasan moral, legal dan ideologi yang dianggapnya utopis dan bahkan berbahaya. Ia menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama. Demikianlan Morgenthau membangun konsep abstrak yang artinya tidak mudah di definisikan, yaitu kekuasaan (power) dan kepentingan (interest), yang dianggapnya sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional. Para pengkritiknya, terutama ilmuan dari aliran saintifik, menuntut definisi operasional yang jelas tentang konsep dasar tersebut.

Kepentingan nasional adalah wasit terakhir dalam menentukan kebijakan luar negeri. Masyarakat dan moralitas manusia dibatasi pada negara dan tidak meluas pada hubungan internasional yang merupakan arena politik dari kekacauan yang besar, perselisihan, konflik antar negara - negara yang berkekuatan besar mendominasi

pihak-pihak lain. Fakta bahwa semua negara harus mengejar kepentingan nasionalnya sendiri berarti bahwa negara dan pemerintahan lainnya tidak akan pernah dapat diharapkan sepenuhnya. Seluruh kesepakatan internasional bersifat sementara dan kondisional atas dasar keinginan negara- negara untuk mematumhinya. Semua negara harus siap mengorbankan kewajiban internasionalnya yang berdasar pada kepentingannya sendiri jika dua negara terlibat dalam konflik. Hal itu menjadikan perjanjian - perjanjian dan semua persetujuan, konvensi, kebiasaan, aturan dan hukum lainnya, antara negara - negara hanyalah berupa pengaturan yang bijaksana yang dapat dan akan dikesampingkan jika semua itu berseberangan dengan kepentingan negara. Tidak ada kewajiban internasional dalam pengertian moral dari kata itu (yaitu terikat kewajiban timbal balik) antara negaranegara merdeka.

Rational Choice (Pilihan Rasional)

Rasionalitas merupakan konsep dasar yang digunakan Weber dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Tindakan rasional menurut Weber berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Pengertian rasional disini adalah masuk akal. Weber mencontohkan orang membeli baju dengan harga yang murah ketimbang harga yang mahal merupakan hal yang rasional (Doyle, 1994: 220). Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang

mempunyai tujuan atau mempunyai maksud. Artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktor pun dipandang mempunyai pilihan atau nilai, keperluan yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihannya.

Menurut Weber, tindakan rasional berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Bahwa bermula dari adanya pilihan yang dipertimbangkan dengan rasio manusia lalu ditindaklanjuti dengan tindakan yang nyata. Weber membedakan tindakan sosial manusia, seperti tindakan rasionalitas instrumental (*Zwerk Rational*). Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Pertimbangan yang dimaksud antara lain untuk mengejar kepentingan rasional, penggunaan kecanggihan teknologi untuk pencapaian tujuan, dan adanya strategi untuk mencapai tujuan.

Karakteristik utama dari berbagai bentuk rasionalitas adalah bahwa semuanya melakukan pemilihan secara bernalar tentang perlunya mengambil arah tindakan tertentu untuk memecahkan masalah kebijakan. Bentuk-bentuk rasionalitas menurut Paul Diesing, adalah sebagai berikut:

Rasionalitas Teknis

Rasionalitas teknis merupakan karakteristik pilihan yang bernalar yang meliputi perbandingan berbagai alternatif atas dasar kemampuan masing-masing memecahkan masalah secara efektif.

Rasionalitas Ekonomis

Rasionalitas ekonomis merupakan karakteristik pilihan yang bernalar yang membandingkan berbagai alternatif atas dasar kemampuan untuk menemukan pemecahan masalah yang efisien. Rasionalitas adalah bahwa semuanya melakukan pemilihan secara bernalar tentang perlunya mengambil arah tindakan tertentu untuk memecahkan masalah kebijakan.

Rasionalitas Legal

Rasionalitas legal merupakan karakteristik pilihan yang bernalar yang meliputi perbandingan alternatif menurut kesesuaian hukumnya terhadap peraturan-peraturan dan kasus-kasus penyelesaian sebelumnya.

Rasionalitas Sosial

Rasionalitas sosial merupakan karakteristik pilihan yang bernalar menyangkut perbandingan alternatif menurut kemampuannya dalam mempertahankan atau meningkatkan institusi-institusi sosial yang bernilai.

Rasionalitas Substantif

Rasionalitas substantif merupakan karakteristik pilihan yang bernalar

menyangkut perbandingan berbagai bentuk rasionalitas -teknis, ekonomis, legal, sosial-dengan maksud agar dapat dibuat pilihan yang paling layak di bawah kondisi yang ada.

Pemimpin Konsiliator

Konsolisiatoris terdiri atas perilaku yang bersifat direktif, konsultatif, reaktif dan akomodatif. Dari sini kita dapat mengenali, pribadi pemimpin yang direktif yang dicirikan dengan menghargai adanya perbedaan, tertutup akan informasi, fokus pada persoalan yang mana secara personal mengarahkan kebijakan bersamaan dengan langkah-langkah yang konsisten dengan pandangan sendiri juga bekerja dengan norma dan aturan posisi saat ini. Pemimpin yang reaktif menghargai batasan, terbuka akan informasi. Fokus persoalan terletak pada situasi alamiah persoalan itu sendiri dan mempertimbangkan apa yang konstituen anggap penting. Pemimpin yang akomodatif artinya pemimpin yang menghargai batasan-batasan yang ada, terbuka akan informasi, fokus pada hubungan, berbagi tanggung jawab dalam prosesnya (Hudson, 2013, hlm. 60).

Konseptualisasi dari pemimpin berdasarkan penelitian Jerrold Post (2003) dan Margaret Hermann (2013) bermanfaat untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pribadi presiden. Selain itu, faktor-faktor tadi dapat digunakan untuk menentukan indikator dan subindikator. Sub indikator bermanfaat untuk mempermudah merumuskan pertanyaan jika menggunakan teknik analisis isi. Untuk mengkaji kebijakan luar negeri dengan menggunakan level

analisis individu, diperlukan sejumlah teknik yang bersifat khas. Sebagian besar kajian kebijakan luar negeri masih menggunakan arus utama yang mana menggunakan level analisis individu. Hudson merinci sejumlah pertanyaan penting yang perlu dijawab dalam mengkaji peran individu dalam politik luar negeri.

Pertama adalah, tipe pemerintahan yang seperti apa yang dapat memainkan peran penting dalam menjawab kapan seorang individu menjadi sangat penting dalam politik luar negeri. Setiap rezim negara memiliki batasan masing masing akan kontrol pemimpinnya dalam suatu kebijakan. Kedua, sangat penting untuk mengetahui apakah seorang pemimpin cukup tertarik terjun dalam politik luar negeri. Semakin seorang pemimpin tidak tertarik untuk terjun dalam politik luar negeri, semakin besar ia akan mendelegasikan kekuasaan dan pengambilan keputusan pada siapa ia anggap cukup berwenang. Hal ketiga yang dapat menjawab kapan pemimpin menjadi penting dalam urusan luar negeri adalah ketika terjadi krisis. Situasi krisis biasanya akan diatasi oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Apalagi jika hal yang dipertaruhkan semakin besar misalnya kedaulatan negara sedang dipertaruhkan. Hal keempat adalah karakter pemimpin akan menguat dalam politik luar negeri pada situasi yang penuh ketidakpastian.

Ketika dewan pertimbangan tidak dapat mengambil keputusan bulat akan suatu hal yang sifatnya sangat penting. Maka presiden

akan diminta untuk memberi masukan dan mengambil putusan akhir. Hal ini diperlukan jika terdapat perencanaan jangka panjang yang mana terdapat doktrin strategis atau pendekatan terhadap persoalan tertentu dari suatu hal yang belum terjadi atau belum dapat diprediksi. Margaret Herman meletakkan variabel kelima yakni tingkat apakah pemimpin sebelumnya telah mendapat latihan diplomat. Herman berpendapat, pemimpin dengan sejarah latihan diplomat meminta bawahannya untuk mempelajari karakter personal dari persyaratan diplomatik yang dibutuhkan pada situasi tertentu. Pemimpin yang tidak memiliki latihan seperti ini seringkali menunjukkan sikap kurang peka. Maka tidak heran, Margaret Hermann kemudian menyebutnya dengan “tidak sensitive” (insensitive). Keahlian di bidang tertentu juga turut menentukan besar tidaknya peran pemimpin. Pertanyaan yang muncul untuk dapat mengukur keahlian di bidang politik luar negeri dapat diketahui dengan apakah pemimpin cukup ahli di banyak bidang dan mengetahui banyak hal yakni informasi yang diperlukan sehingga dapat mengambil keputusan yang paling sesuai di situasi yang paling sulit.

METODE

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang ditempuh untuk memecahkan sebuah permasalahan yang akan diteliti dalam sebuah penelitian. Pada penulisan artikel ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada

kualitas atau hal terpenting dari sifat suatu barang atau benda. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori.

Sejalan dengan hal tersebut, jenis penelitian kualitatif yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan teknik studi literatur. Studi literatur merupakan teknik penelitian yang dilakukan untuk mengkaji dan meninjau secara kritis sebuah permasalahan yang akan diteliti. Peneliti akan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen, arsip, buku, artikel, makalah dan hasil penelitian lainnya. Maka dari itu, dalam artikel dengan membahas mengenai Perbandingan Sistem Pemerintahan Prancis- Indonesia Pada Masa Pemerintahan Jokowi Dan Emmanuel Macron ini akan menggunakan teknik ini agar dapat mendapatkan data dan fakta yang relevan dengan permasalahan di atas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Kebijakan Pemerintahan Indonesia di Masa Presiden Joko Widodo

Sejak dilantiknya menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai wakilnya segera menyusun kabinet kerja agar dapat segera melaksanakan program kerja sebagai janji politiknya saat kampanye. Adapun program kerja yang ditawarkan saat kampanye oleh Presiden Joko Widodo saat kampanye dikenal dengan nama Nawacita yaitu Sembilan (9)

Program perubahan untuk Indonesia antara lain (Pusbindiklatren.bappenas.go.id/, 29 - April 2017):

1. Menolak Negara lemah dengan melakukan Reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
2. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
3. Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia;
4. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap Bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
5. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
6. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestic;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.

Dari program kerja yang dikenal dengan Nawacita ini model pemerintahan yang ingin dilakukan oleh Presiden Joko Widodo mirip dengan gaya pemerintahan masa Soekarno dimana keinginan besar Soekarno adalah menginginkan Indonesia menjadi macan asia menjadi Negara besar yang

ditakuti oleh Negara-negara lain di dunia. Kedekatan kepada rakyat dengan turun langsung ke masyarakatan didaerah-daerah untuk melihat secara langsung keadaan rakyat dan melihat secara langsung hasil kerja dari para menteri.Melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum adalah bagian dari kebijakan pemerintah dalam bidang hukum untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Analisis Sistem Pemerintahan Prancis di Masa Emmanuel Macron

Emmanuel Macron merupakan presiden ke-25 yang lahir dari daerah Amiens, Prancis pada 21 Desember 1977 di mana pada saat itu terjadi Perang Dingin. Macron merupakan keturunan dari Jena dan Michel Macron yang merupakan Profesor Neurologi di Universitas Picardy dan francoise Macron, Nogues. Ia menjadi dewasa di lingkungan para profesor yang membuat dia tumbuh menjadi sosok yang cemerlang. Emmanuel Macron menempuh pendidikan selama beberapa tahun di Lycee La Providence In Amiens yang didirikan oleh Yesuit sebelum dia melanjutkan pendidikannya di sekolah tinggi Elite Lycee Henri IV di Paris dan Paris X Nanterre (DEA dalam bidang Filsafat). Sehingga filsafat ialah bidang asli Macron sebelum akhirnya bekerja menjadi bankir.

Macron adalah seorang pejabat dan politikus yang terpilih menjadi seorang Presiden Perancis pada pemilihan umum tahun 2017, pada tahun 2014 nama Macron

belum terkenal oleh masyarakat Perancis kemudian ia menjadi calon presiden terkuat mengalahkan Marine Le Pen dengan perolehan suara sebanyak 65,8 persen (kompas.id, 2017). Terdapat dua hal menarik dari pemilu Prancis. Pertama, Macron menjadi Presiden termuda negara Perancis dalam sejarah, dalam usianya yang masih 39 tahun. Kedua, margin keunggulan suara yang diperoleh Macron melampaui margin kemenangan Presiden Jacques Chirac dari partai konservatif yang meraih 82,2 persen suara atas ayah Marine Le Pen, pendiri Front Nasional sayap kanan, yaitu Jean-Marie Le Pen, dalam pemilihan presiden 2002 (kompas.id, 2017). Saat melakukan kampanye ia mencetuskan beberapa hal yang akan dilakukan saat terpilih menjadi Presiden Perancis adalah berkomitmen terhadap Perancis yang terbuka, serta berjanji mengedepankan inovasi dan reformasi ekonomi. Dia juga berjanji akan melindungi kelas pekerja. Pidato Presiden Macron juga menyatakan pendapatnya dan posisi Perancis di tengah-tengah ketidakpastian global. Ia menyatakan Perancis akan tetap Bersama dengan Uni Eropa dan mengedepankan kemitraan global yang strategis. Dia berani mengungkapkan bahwa Perancis harus tetap memegang teguh nilai-nilai Liberte, Egalite dan Fraternite yang masing-masing memiliki arti kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan.

Emmanuel Macron menunjukkan rasa simpati dan solidaritas terhadap warga pengungsi dan imigran. Dalam berbagai kesempatan ia menjamin komitmen Perancis untuk tetap berdampingan dengan

Uni Eropa dan menjauhi praktik yang ia sebut dapat mengancam kestabilan global (kompas. id, 2017). Emmanuel macron juga memiliki kepercayaan diri yang besar ini dibuktikan ketika ia maju sebagai calon presiden Prancis walaupun berasal dari partai yang masih muda, tidak memutuskan semangatnya untuk menjadi seorang pemimpin. Ini merupakan sebuah hal yang sangat ekstrim, mengingat dia seorang politikus yang baru lahir dan langsung membentuk partainya sendiri yang dia berikan nama En Marche! Yang memiliki arti maju kedepan! Rasa percaya diri dan motto dari partainya, dia berhasil menjadi Presiden mengalahkan Marine Le Pen dari Partai Nasional. Emmanuel Macron berhasil menyingkirkan partai arus utama dan menyingkirkan partai sayap kanan yang mengusung Islamofobia yang anti imigran dan ingin Perancis keluar dari Uni Eropa. Tentu saja ini sangat melegakan bagi warga Perancis dan bagi Uni Eropa setelah Macron yang berhasil menduduki kursi presiden yang memiliki motto sejalan dengan keinginan warganya.

Saat ini Perancis sedang dilanda gelombang dua isu yang menjadi perhatian utama Presiden Macron karena menentukan arah kebijakan negara. Isu tersebut ialah kebijakan imigrasi dan kebijakan anti-ras. Presiden Macron dalam pidato inaugurasinya menegaskan bahwa kebijakan imigrasi Perancis berjalan selaras dengan kebijakan Uni Eropa. Uni Eropa sendiri dengan tegas tidak menolak gelombang imigran yang berasal dari negara-negara berkonflik. Presiden Macron juga menolak

bersikap anti-rasis. Pernyataan ini juga menjadi inti arah kebijakan yang akan diperjuangkan selama masa pemerintahannya. Hal ini berbeda dengan kampanye yang dilakukan oleh pesaingnya pada pemilu 2017 yang bersikap anti Uni Eropa, anti-imigran, serta cenderung rasis seperti sebagian besar gelombang populisme yang

Perbandingan Pemerintahan Indonesia dan Prancis

Perbandingan sistem pemerintahan yang digunakan Republik Indonesia dan sistem pemerintahan yang digunakan Republik kelima Prancis. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari sistem pemerintahan yang digunakan oleh kedua negara serta kedudukan lembaga eksekutif pada kedua negara, sistem pemerintahan yang digunakan oleh negara Republik Indonesia pada periode sekarang adalah sistem pemerintahan presidensial hal tersebut terlihat jelas bahwa dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia hanya ada Presiden sebagai Kepala Negara, sedangkan dalam hal penerapan sistem pemerintahan Republik kelima Prancis menganut sistem pemerintahan semi presidensial dimana lembaga eksekutif dalam sistem pemerintahan ini terbagi atas Presiden sebagai Kepala Negara dan Perdana Menteri sebagai pemegang pemerintahan.

Sistem pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh presiden Joko Widodo ini dapat dilihat dari model pemerintahan yang ingin dilakukan oleh Presiden Joko Widodo mirip dengan gaya pemerintahan masa

Soekarno dimana keinginan besar Soekarno adalah menginginkan Indonesia menjadi macan asia menjadi Negara besar yang ditakuti oleh Negara-negara lain di dunia. Kedekatan kepada rakyat dengan turun langsung ke masyarakat di daerah-daerah untuk melihat secara langsung keadaan rakyat dan melihat secara langsung hasil kerja dari para menterinya. Sedangkan sistem pemerintahan Perancis yang dipimpin oleh Emmanuel Carnos memiliki gaya kepemimpinan lebih dekat pada meminjam konsep gaya kepemimpinan milik Jerrold Post, Hermann dan Hudson sebagai konsiliatoris. Ciri-ciri konsiliator lebih melekat pada figur Presiden Macron dari peristiwa yang terjadi semenjak Macron dilantik menjadi presiden pada Mei 2017. Ciri-ciri tersebut antara lain Presiden Macron sedikit menunjukkan bukti bahwa ia menantang Batasan Batasan dalam ranah hubungan internasional yang berlaku seperti hubungan diplomatic, kerjasama, kesepakatan yang telah berjalan dan lainnya. Jika dibandingkan dengan Presiden Trump, maka Presiden Macron lebih dekat dengan gaya kepemimpinan yang tidak ambisius dan tidak mengejar dan meluaskan kekuasaan pengaruhnya.

KESIMPULAN

Pada dasarnya, setiap negara dalam mengatur jalannya roda pemerintahannya menggunakan sistem pemerintahan yang berbeda-beda, negara dan sistem pemerintahan adalah suatu kesatuan dimana lembaga-lembaga negara bekerja

dan berhubungan satu sama lain, dimana setiap lembaga negara harus menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin agar tujuan dari suatu negara tersebut berhasil menyelenggarakan serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat beberapa perbedaan antara sistem pemerintahan yang diterapkan oleh negara Republik Indonesia dan sistem pemerintahan yang digunakan oleh negara Perancis, dimana dalam hal ini sistem pemerintahan yang digunakan oleh negara Republik Indonesia berdasarkan konstitusi yang berlaku adalah sistem pemerintahan presidensial sedangkan sistem pemerintahan yang digunakan oleh negara Perancis Republik kelima adalah sistem pemerintahan semi presidensial. Perbedaan sistem pemerintahan yang diterapkan pada kedua negara adalah suatu hal yang wajar, perbedaan tersebut diantaranya terletak pada tatanan lembaga eksekutif, lembaga legislatif serta lembaga yudikatif pada kedua negara dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Sistem pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh presiden Joko Widodo ini dapat dilihat dari model pemerintahan yang ingin dilakukan oleh Presiden Joko Widodo mirip dengan gaya pemerintahan masa Soekarno dimana keinginan besar Soekarno adalah menginginkan Indonesia menjadi macan asia menjadi Negara besar yang ditakuti oleh Negara-negara lain di dunia. Kedekatan kepada rakyat dengan turun langsung ke masyarakat di daerah-daerah untuk melihat secara langsung keadaan

rakyat dan melihat secara langsung hasil kerja dari para menterinya. Sedangkan sistem pemerintahan Perancis yang dipimpin oleh Emmanuel Carnos memiliki gaya kepemimpinan lebih dekat pada meminjam konsep gaya kepemimpinan milik Jerrold Post, Hermann dan Hudson sebagai konsiliatoris. Presiden Macron dapat digolongkan sebagai figure yang bertanggung jawab dalam proses. Hal ini ditegaskan melalui komitmennya untuk mengajak negara-negara anggota Uni Eropa untuk menguatkan pertahanan dan keamanannya di tengah-tengah sentiment mundurnya Amerika Serikat dan kerumitan yang diakibatkan oleh peristiwa yang melibatkan Rusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Presiden Macron adalah figur pemimpin dengan gaya kepemimpinan konsiliator setelah dikaji menggunakan level analisis individu. Saran untuk penelitian ke depannya adalah menggunakan data peristiwa dan diolah menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan melibatkan lebih banyak figure presiden negara berpengaruh agar mendapat hasil signifikan korelasi antara kepribadian, motivasi dan keyakinan dengan kebijakan luar negeri suatu Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, W. R. D., & Fathun, L. M. (2020). Diplomasi Ekonomi Indonesia di Dalam Rezim Ekonomi G20 Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Intermestic: Journal of International Studies*, 5(1), 47-68.

- Dallison, P. (2018, November 15). Macron to Trump: 'I do not do policy or diplomacy by tweets.'
- Diambil 08 January 2023, dari <https://www.politico.eu/article/emmanuel-macron-to-donald-trump-i-do-not-do-policy-or-diplomacy-by-tweets/>
- Fariz, D. (2019). Pemerintahan Joko Widodo dan serangan politik terhadap KPK. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2), 19-33.
- Gusti, H. I. K., Sugiharto, I., & Asmarudin, I. (2022). PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA DAN PRANCIS. Penerbit NEM.
- Hermann, M. G. (2020). Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders. *International Studies Quarterly*, 24(1), 7–46. <https://doi.org/10.2307/2600126>
- Hermann, M. G., & Milburn, T. W. (2017). *A Psychological examination of political leaders*. Free Press. Hudson, V. M. (2013). *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory*. Rowman & Littlefield.
- Iza, N. S., Rosyidin, M., & Windiani, R. (2022). Sekuritisasi Presiden Emmanuel Macron Terhadap Imigran Muslim Melalui Undang-Undang Anti-Separatisme Perancis. *Journal of International Relations*, 8(4), 732-746.
- Kalsum, A. F., & Andriani, M. Strategi Penipuan pada Teks Fake News Berbahasa Prancis Terkait Emmanuel Macron di Media Sosial. *SASDAYA: Gajah Mada Journal of Humanities*, 6(1), 18- 33.
- Madu, L. (2014). Reorientasi Politik Luar Negeri Indonesia pada Pemerintahan Joko Widodo, 2014–2019. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur*, 9(2), 104.
- Muhammad Mahsun, S. I. P. *Metodologi Perbandingan Pemerintahan*.
- PUTRA, A. P. H. (2021). Analisis Kebijakan Prancis Terhadap Keanggotaan Turki Di Uni Eropa Era Emmanuel Macron (2017-2019).
- Rahmatunnisa, A. *Jurnalisme Damai Pada Pemberitaan Pernyataan Emmanuel Macron Atas Kasus*
- Puspitarini, R. C. (2020). Kajian kebijakan politik internasional: Metode, teori & studi kasus. *Jakad Media*. [http://repository.upm.ac.id/2194/Charlie e Hebdo Di Harian Umum Republika](http://repository.upm.ac.id/2194/Charlie%20Hebdo%20Di%20Harian%20Umum%20Republika) (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sari, N. L. A., & Suwanda, I. W. (2019). Kebijakan di Era Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Perspektif Politik Hukum dan Agraria). *Ganec Swara*, 13(2), 237-243.
- Sya'ban, N. (2020). Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
- SUNIARTI, F. (2021). Analisis Perubahan

Kebijakan Imigrasi dan Suaka di Prancis
Pada Pemerintahan Emmanuel Macron
Tahun 2017-2020 (Doctoral dissertation,
Universitas Jenderal Soedirman).